

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu isu yang sering menjadi perbincangan di tengah masyarakat global adalah pemanasan global (Rembulan et al., 2024). Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, seperti meningkatnya suhu rata-rata bumi, terjadinya kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut, serta penipisan lapisan ozon, menunjukkan besarnya ancaman terhadap lingkungan (Sarroukh et al., 2024). Kerusakan lingkungan akibat pemanasan global berpotensi menjadi semakin parah apabila tidak segera di atasi secara serius. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk menunjukkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup (Scafetta, 2024). Meningkatnya kesadaran terhadap ancaman pemanasan global dan dampaknya terhadap kerusakan ekosistem mendorong berbagai perusahaan melakukan cara-cara inovatif untuk memperkenalkan pendekatan bisnis baru yang dikenal sebagai “wirausaha hijau” (Risco et al., 2021; Hussain et al., 2021).

Wirausaha hijau berperan penting dalam mengatasi persoalan lingkungan yang hingga kini masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan penanganan sampah. Konsep ini mengintegrasikan praktik bisnis yang mendukung kelestarian lingkungan serta berorientasi pada keberlanjutan (Sanyal et al., 2025; Prasetyo et al., 2025; Supardi & Lubis, 2024). Prinsip-prinsip wirausaha hijau sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh (Nuringsih et al., 2022). Fokus utama dari kewirausahaan hijau tidak hanya terletak pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, namun juga melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar (Badjeena et al., 2024).

Penerapan konsep ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, kegiatan daur ulang, serta strategi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk dari kewirausahaan

hijau meliputi pengembangan produk energi terbarukan, pemakaian bahan yang ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi hemat energi, penggunaan air secara efisien, dan produksi kemasan yang dapat terurai secara alami (Kulova et al., 2024). Dengan demikian, kewirausahaan hijau mencakup lebih dari sekedar produk ramah lingkungan, tetapi juga aspek teknologi dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Kewirausahaan secara umum memiliki peran penting dalam terwujudnya pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan (Borah & Bhowal, 2023; Mustikawati & Kurjono, 2020). Namun, dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, pelaku usaha perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial secara seimbang. Nilai-nilai lingkungan saat ini dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan nilai ekonomi dan sosial, khususnya untuk mendukung pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 (Gong et al., 2024).

Kewirausahaan hijau merupakan pendekatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan penerapan prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi hingga distribusi. Kewirausahaan hijau berfokus terhadap keberlanjutan lingkungan yang tercermin dalam beberapa sasaran SDGs, seperti energi bersih dan terjangkau (SDGs-7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs-8), industri, inovasi, dan infrastruktur (SDGs-9), penerapan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDGs-12), dan penanganan perubahan iklim (SDGs-13). Seluruh tujuan tersebut saling terhubung dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan (SDGs-1), mengurangi kelaparan (SDGs-2), serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (SDGs-3). Dengan demikian, kewirausahaan hijau tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi strategi integral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang holistik, inklusif dan berkeadilan (Ziaul & Shuwei, 2023). Gambar 1.1 di bawah ini menggambarkan keterkaitan antar indikator SDGs yang berfokus pada isu lingkungan dan kontribusinya terhadap tujuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.



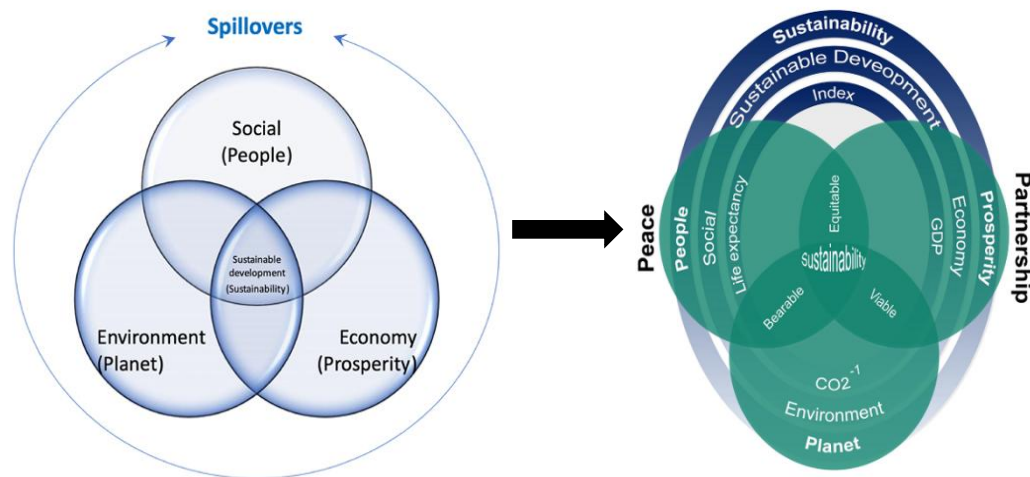
Gambar 1.1 Sasaran SDGs Penelitian

Sumber: United Nations, 2022

Sasaran SDGs di atas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan memastikan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Mann et al., 2024). Berkaitan dengan agenda SDGs di atas, Indonesia menjadi salah satu negara yang terus berkomitmen dan mendukung secara penuh berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan (Asmayawati et al., 2024). Pelaksanaan SDGs di Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional yang bersifat universal, partisipatif dan inklusif. Dalam pelaksanaannya, Indonesia mengutamakan empat pilar dalam pelaksanaannya, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola (Arifin et al., 2024). Sebagai negara yang kaya dan besar potensi sumber daya alamnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menciptakan kehidupan yang lebih berkelanjutan untuk masa depan (Hermawati et al., 2023). Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah yang didukung oleh berbagai negara di dunia terus diupayakan untuk mendorong terwujudnya tujuan kehidupan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah adalah menciptakan kondisi usaha yang ramah lingkungan. Konsep ekonomi hijau

(*green economy*) hadir sebagai pendekatan baru yang membawa pengaruh besar terhadap dunia usaha, baik di tengah masyarakat global maupun di Indonesia (Pacheco et al., 2024). Pendekatan ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, serta mengurangi kesenjangan antara generasi saat ini dan generasi mendatang (Firmansyah, 2022). Tujuan utama dari ekonomi hijau mencakup peningkatan investasi pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang berorientasi pada keberlanjutan dan penguatan modal alam, sekaligus berperan dalam mengatasi krisis lingkungan serta ancaman terhadap lingkungan (Kasztelan, 2017). Gambar 1.2 berikut ini memperlihatkan dasar pentingnya penerapan wirausaha hijau sekaligus pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, bukan hanya sebagai cara mewujudkan bisnis yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi kehidupan yang lebih baik.



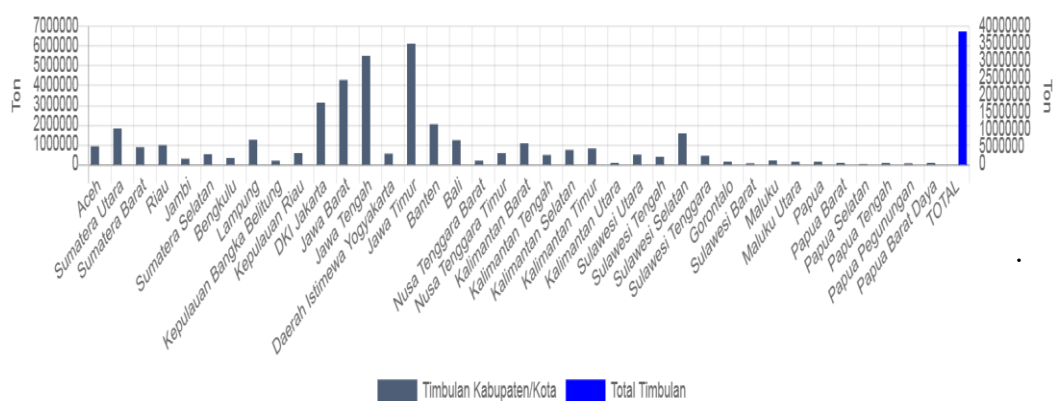
Gambar 1.2 Pilar Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial dalam SDGs

Sumber: Huang & Akbari, 2024

Wirausaha hijau merupakan pendekatan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Gambar 1.2 menunjukkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berdasar pada tiga pilar utama, yaitu aspek lingkungan (*planet*), ekonomi (*prosperity*), dan sosial (*people*). Ketiga unsur

tersebut saling bertinteraksi dan menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan perlu dijadikan dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tujuannya tidak semata-mata menciptakan kesejahteraan finansial, melainkan juga menjaga kelestarian lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan sosial. Pendidikan kewirausahaan yang menanamkan nilai keberlanjutan serta didukung oleh tingkat efikasi diri yang tinggi berpotensi meningkatkan minat untuk berwirausaha yang ramah lingkungan.

Salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia terletak pada persoalan limbah dan sampah yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023 mencatat bahwa dari 369 kabupaten/kota se-Indonesia, timbulan sampah nasional mencapai 38.477.679,73-ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38,42% atau sekitar 14.784.991,71-ton sampah belum tertangani dengan baik. Wilayah Jawa Barat menempati urutan ketiga sebagai wilayah dengan volume sampah terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan timbulan sampah mencapai 4.279.095,54-ton pada tahun 2023. Fakta ini memperlihatkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi isu serius, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Secara rinci, data timbulan sampah setiap provinsi ditunjukkan pada gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1.3 Timbulan Sampah Setiap Provinsi di Indonesia

Sumber: SIPSN, 2023

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, wilayah Jawa Barat memiliki permasalahan yang cukup serius mengenai permasalahan sampah dengan tingkat timbulan sampah terbanyak ketiga di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, jumlah timbulan sampah di wilayah tersebut mencapai 4.279.095,54-ton. Fakta ini mengindikasikan bahwa persoalan sampah di Jawa Barat berada pada tingkat yang cukup serius dan memerlukan penanganan yang terstruktur dan tersistematis dari berbagai pihak. Salah satu langkah terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan penerapan konsep wirausaha hijau. Gagasan ini dinilai relevan karena aktivitas kewirausahaan sering kali melibatkan penggunaan kemasan produk, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah. Penerapan kemasan yang ramah lingkungan, sebagaimana yang ditawarkan dalam kerangka kewirausahaan hijau berpotensi menjadi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin memprihatinkan tersebut (Frommeyer et al., 2024).

Munculnya konsep ekonomi hijau pada akhirnya memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia wirausaha untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar (Bian, 2024; Tekala et al., 2024). Wirausaha sejatinya memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan berkelanjutan, mengingat berbagai kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari penggunaan teknologi dan produk yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan (Chang & Yang, 2024). Trend yang sedang berkembang di dunia usaha saat ini adalah wirausaha hijau, yang berfokus pada penciptaan produk dan layanan yang ramah lingkungan, efisien dalam pemanfaatan energi, dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Wirausaha hijau menitikberatkan pada inovasi, teknologi yang ramah lingkungan, serta mempertimbangkan siklus hidup produk (Rizki et al., 2023). Oleh karena itu, pelaku usaha yang berfokus pada pengelolaan limbah menjadi barang yang bernilai guna memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai wirausaha hijau, penting untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kondisi kewirausahaan secara umum. Secara umum, kewirausahaan merupakan aktivitas yang melibatkan individu atau

kelompok dalam rangka menciptakan nilai ekonomi melalui pembentukan bisnis atau usaha, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sudewi et al., 2024). Kewirausahaan tidak hanya dianggap sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi dan teknologi baru, tetapi juga berperan penting dalam katalisator meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Tahir & Burki, 2023). Faktanya, kegiatan wirausaha mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara signifikan, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas (Negi, 2023). Selain itu, dalam konteks ekonomi global, kewirausahaan dianggap mampu meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat daya saing suatu negara (Praag & Versloot, 2007; Nitu-Antonie et al., 2017; Urbano et al., 2020).

Selain dampaknya terhadap perekonomian, kewirausahaan juga berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan (Gregori & Holzmann, 2022; Shahid et al., 2023). Seiring berjalannya waktu, inovasi dalam bidang kewirausahaan terus mengalami peningkatan dan berorientasi pada solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Supardi et al., 2025). Sebagai contoh, *green entrepreneurship* atau wirausaha hijau muncul sebagai respon terhadap isu-isu lingkungan yang semakin mendesak, seperti permasalahan iklim dan polusi (Neumann, 2022). Melalui penyediaan produk dan layanan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan, kewirausahaan hijau berkontribusi tidak hanya dalam meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan peluang bisnis baru yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan (Meirun et al., 2020).

Meskipun kewirausahaan menyediakan beragam peluang dan keuntungan, tingkat minat masyarakat Indonesia untuk memulai usaha masih relatif rendah. Berbagai faktor berperan penting dalam mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha, seperti ketidakpastian kondisi pasar, keterbatasan dana, serta minimnya dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar (Alawamleh et al., 2023). Intensi atau minat merujuk pada minat yang kuat pada seseorang untuk melakukan sesuatu (Knapova et al., 2024). Dalam konteks psikologi dan penelitian,

intensi seringkali berkaitan dengan rencana atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu di masa depan (Simpson, 2023). Intensi merupakan elemen kunci dalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa minat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol diri (Ajzen, 1991). Penjelasan ini menunjukkan bahwa intensi adalah bagian penting yang mendorong seseorang untuk mengambil suatu tindakan.

Kewirausahaan hijau menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di negara maju, kewirausahaan hijau berkembang pesat karena dukungan regulasi yang kuat, inovasi teknologi, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Perusahaan di negara maju, terutama di Eropa, semakin banyak yang menawarkan produk dan layanan ramah lingkungan yang didorong oleh kebijakan seperti *European Green Deal* dan menargetkan ekonomi rendah karbon (Vasilescu et al., 2023). Selain itu, pemerintah menyediakan berbagai insentif, seperti subsidi energi terbarukan dan pendanaan untuk penelitian serta pengembangan teknologi hijau. Dukungan ini memungkinkan wirausahawan di negara maju lebih berani berinovasi dalam menciptakan produk dan jasa yang memberikan keuntungan dan berdampak positif terhadap lingkungan (Vasilescu et al., 2023).

Meskipun demikian, negara maju masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan kewirausahaan hijau. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya produksi dan investasi awal yang diperlukan untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Produk hijau sering kali lebih mahal dibandingkan produk konvensional, yang membuat produsen lebih berhati-hati dalam mengadopsinya. Selain itu, regulasi lingkungan yang ketat, meskipun bermanfaat dalam jangka panjang, dapat menjadi hambatan bagi perusahaan kecil dan menengah yang harus beradaptasi dengan standar tinggi dan prosedur perizinan yang kompleks. Tidak hanya itu, persaingan pasar juga menjadi tantangan lainnya, terutama bagi *startup* hijau yang harus bersaing dengan perusahaan besar yang telah memiliki sumber daya lebih unggul untuk melakukan inovasi dan ekspansi.

Sementara itu di negara berkembang, kewirausahaan hijau mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan. Negara-negara seperti India, Brasil, dan Kenya menunjukkan peningkatan jumlah *startup* yang cukup pesat dengan kegiatan berfokus pada solusi ramah lingkungan, terutama di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata (Salaheldeen et al., 2024). Keunggulan negara berkembang terletak pada melimpahnya sumber daya alam, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model bisnis hijau berbasis lokal. Selain itu, adanya permintaan global terhadap produk berkelanjutan, seperti kopi *fair trade* dan kerajinan tangan ramah lingkungan, memberikan peluang bagi wirausahawan hijau di negara berkembang untuk mengakses pasar internasional yang lebih luas.

Namun, pengembangan kewirausahaan hijau di negara berkembang tidak terlepas dari tantangan besar. Akses terhadap pembiayaan menjadi hambatan utama, mengingat sebagian besar usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan inovasi hijau. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai seperti aliran listrik yang terbatas dan teknologi yang belum merata, juga menghambat pertumbuhan bisnis hijau. Selain itu, ketidakjelasan regulasi serta birokrasi yang kompleks membuat banyak wirausahawan kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan juga masih relatif rendah, sehingga permintaan terhadap produk hijau belum sebesar di negara maju.

Dengan demikian, meskipun negara maju dan berkembang memiliki tantangan yang berbeda dalam mengembangkan kewirausahaan hijau, keduanya membutuhkan strategi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Di negara maju, fokus utama adalah pada inovasi yang dapat menekan biaya produksi dan membuat produk hijau lebih kompetitif di pasar. Sementara di negara berkembang, peningkatan akses terhadap pembiayaan, infrastruktur yang lebih baik, serta kebijakan yang lebih mendukung dapat menjadi kunci dalam mendorong lebih banyak wirausahawan untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Sementara itu, kewirausahaan hijau di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks meskipun memiliki potensi besar, terutama karena populasi

pemuda yang besar dan semakin meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa dukungan institusional di Indonesia masih sangat terbatas, baik dalam aspek regulasi maupun akses pendanaan, sehingga menyulitkan pengusaha muda untuk mengembangkan usaha hijau mereka (Gunawan & Fraser, 2016). Selain itu, meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan terkait ekonomi hijau, implementasinya masih berjalan lambat akibat sistem desentralisasi yang membuat kebijakan tidak selalu konsisten di berbagai daerah. Permasalahan lain yang menyebabkan kewirausahaan hijau belum cukup berkembang adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan hijau, sehingga wirausahawan hijau kesulitan dalam membangun pasar yang stabil. Selain itu, biaya logistik dan transportasi yang tinggi di Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau, juga menjadi tantangan besar dalam distribusi produk ramah lingkungan.

Kondisi kewirausahaan di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks (Nurhayati et al., 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari US News & World Report (2019), tercatat bahwa Indonesia berada pada peringkat 43 untuk seluruh kategori dan peringkat 50 untuk kategori kewirausahaan. Selain itu, berdasarkan data yang didapat dari laman Indonesia.go.id (2022) tercatat bahwa tingkat kewirausahaan Indonesia masih sekitar 3,47%. Persentase ini masih tertinggal jauh jika harus dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, seperti Singapura (8,76%), Thailand (4,26%), dan Malaysia (4,74%). Sementara itu, untuk menjadi negara maju, presentase minimal jumlah wirausaha yang harus dicapai oleh suatu negara adalah sebesar 4%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya intensi berwirausaha masyarakat Indonesia dan perlu adanya program khusus dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sedikitnya jumlah wirausaha di Indonesia berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebaliknya, seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2024), jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 152.107.603. Tabel 1.1 berikut akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi angkatan kerja Indonesia.

Tabel 1.1 Jenis Kegiatan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas

Jenis Kegiatan	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	
	2024	
	Februari	Agustus
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	213.997.845	215.371.168
Angkatan Kerja	149.373.908	152.107.603
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,8	70,63
Bekerja	142.179.046	144.642.004
Pengangguran Terbuka	7.194.862	7.465.599
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,82	4,91
Bukan Angkatan Kerja	64.623.937	63.263.565
Sekolah	16.739.955	15.774.285
Mengurus Rumah Tangga	39.499.169	39.270.891
Lainnya	8.384.813	8.218.389
Tingkat Kesempatan Kerja	95,18	95,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat dari Februari hingga Agustus 2024. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka Indonesia juga mengalami peningkatan dari 4,82% menjadi 4,91%. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja atau kemampuan lapangan kerja yang terbatas dalam menyerap angkatan kerja yang ada. Permasalahan ini perlu di atasi agar tidak semakin parah dan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, kenaikan pengangguran terbuka di Indonesia sangat didorong oleh pengangguran terbuka di setiap provinsi. Berdasarkan data dari BPS 2024, sebagian besar wilayah di provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dari bulan Februari ke Agustus 2024. Secara rinci, tabel 1.2 berikut menunjukkan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi pengangguran terbuka di setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Provinsi

38 Provinsi	TPT Berdasarkan Provinsi (Persen)	
	2024	
	Februari	Agustus
Aceh	5,56	5,75
Sumatera Utara	5,1	5,6
Sumatera Barat	5,79	5,75
Riau	3,85	3,7
Jambi	4,45	4,48
Sumatera Selatan	3,97	3,86
Bengkulu	3,17	3,11
Lampung	4,12	4,19
Kep. Bangka Belitung	3,85	4,63
Kep. Riau	6,94	6,39
DKI Jakarta	6,03	6,21
Jawa Barat	6,91	6,75
Jawa Tengah	4,39	4,78
DI Yogyakarta	3,24	3,48
Jawa Timur	3,74	4,19
Banten	7,02	6,68
Bali	1,87	1,79
Nusa Tenggara Barat	3,3	2,73
Nusa Tenggara Timur	3,17	3,02
Kalimantan Barat	4,2	4,86
Kalimantan Tengah	3,67	4,01
Kalimantan Selatan	3,89	4,2
Kalimantan Timur	5,75	5,14
Kalimantan Utara	4,01	3,9
Sulawesi Utara	5,98	5,85
Sulawesi Tengah	3,15	2,94
Sulawesi Selatan	4,9	4,19
Sulawesi Tenggara	3,22	3,09
Gorontalo	3,05	3,13
Sulawesi Barat	3,02	2,68
Maluku	5,96	6,11
Maluku Utara	4,16	4,03
Papua Barat	4,31	4,13
Papua Barat Daya	6,02	6,48
Papua	5,81	6,48

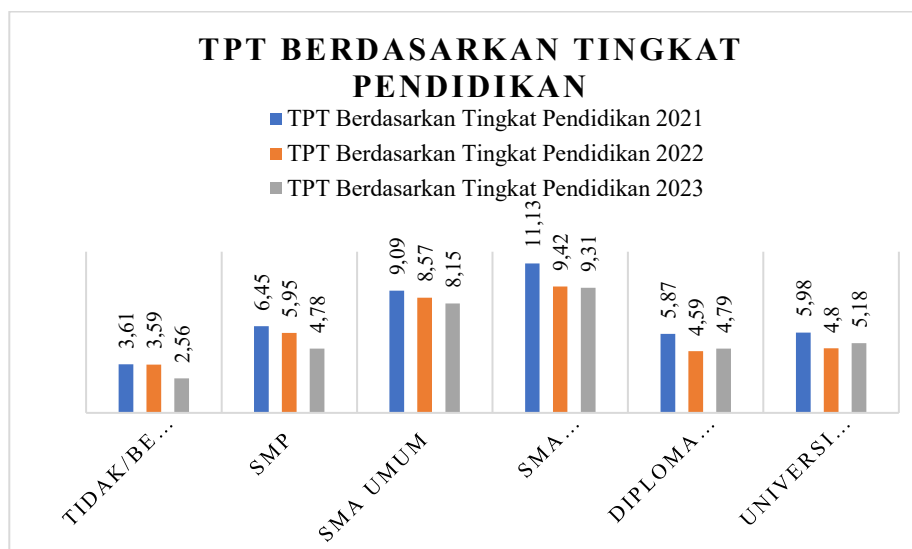
Lanjutan

38 Provinsi	TPT Berdasarkan Provinsi (Persen)	
	2024	
	Februari	Februari
Papua Selatan	4,75	4,05
Papua Tengah	2,49	2,75
Papua Pegunungan	1,18	1,32
Indonesia	4,82	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa TPT di Indonesia bervariasi antar provinsi, yang mencerminkan perbedaan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan dan kondisi perekonomian di masing-masing daerah. Provinsi Jawa Barat dan Banten memiliki TPT tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja menjadi penyebab utama masalah ini. Sebaliknya, provinsi Bali memiliki TPT paling rendah dibanding provinsi lainnya karena industri pariwisata dan UMKM yang cukup berkembang disana. Perbedaan TPT yang berbeda antar provinsi ini mengindikasikan bahwa perlunya kebijakan regional yang dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik tiap daerah. Kebijakan pengembangan kewirausahaan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat menjadi solusi dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran, terutama di daerah yang memiliki TPT yang tinggi.

Kondisi pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya berdasarkan tingkat pendidikan. Berbagai lulusan dari tingkatan pendidikan mengalami permasalahan yang berbeda. Sebagai contoh, lulusan perguruan tinggi mengalami tantangan dalam hal ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Banyak lulusan yang harus berkompetisi untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang terbatas, sehingga sebagian dari mereka memilih untuk bekerja di sektor informal atau bahkan memulai usaha sendiri sebagai alternatif.



Gambar 1.4 Data Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021-2023

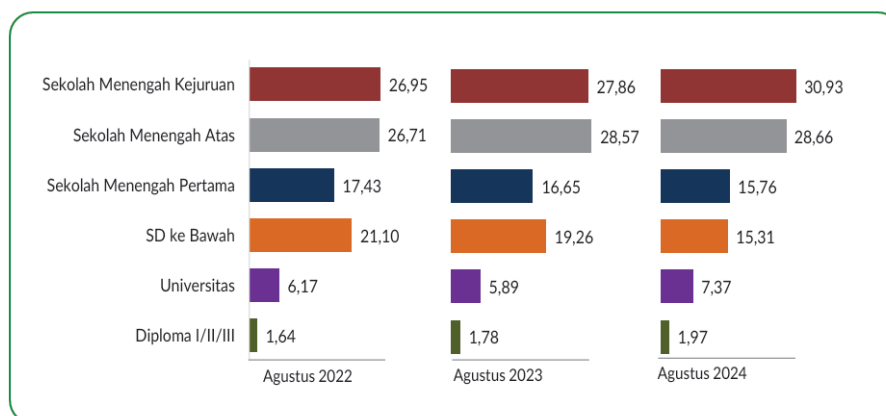
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa data pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada jenjang SMA dan SMK. Namun nilainya cenderung turun dari tahun ke tahun. Berbeda dengan lulusan diploma dan universitas yang angkanya cenderung naik dari tahun 2021-2023. Peningkatan ini menunjukkan sebuah permasalahan penting bagi pemerintah, swasta maupun dunia pendidikan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi, sehingga mereka tidak hanya mampu bersaing di dunia kerja namun juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri agar mengurangi tingkat pengangguran. Berbagai fenomena saat ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang ataupun kualifikasi lulusan yang tidak mumpuni, namun pengangguran bisa juga disebabkan oleh kurangnya minat pemuda di Indonesia untuk memulai berwirausaha, baik karena keterbatasan modal, ketakutan dalam menghadapi resiko maupun peluang masa depan dengan berwirausaha. Berbagai faktor ini yang pada akhirnya menyebabkan banyak pemuda di Indonesia lebih memilih menjadi karyawan atau bekerja dengan orang lain dibanding menjadi seorang wirausaha.

Fenomena ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat nyata di tingkat regional. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk

terbanyak di Indonesia, yakni 50.489.208 jiwa. Kepadatan penduduk yang tinggi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 1.888.287 jiwa. Permasalahan ini menandakan bahwa hampir 4% dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat berada dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan meskipun aktif mencari kerja.

Masalah pengangguran di Jawa Barat cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar, serta rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Sebagai gambaran lebih lanjut mengenai pola dan distribusi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat pendidikan, gambar 1.5 berikut menyajikan data visual yang akan membantu menganalisis kelompok mana yang paling rentan terhadap pengangguran dan apa implikasinya terhadap kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di wilayah ini.



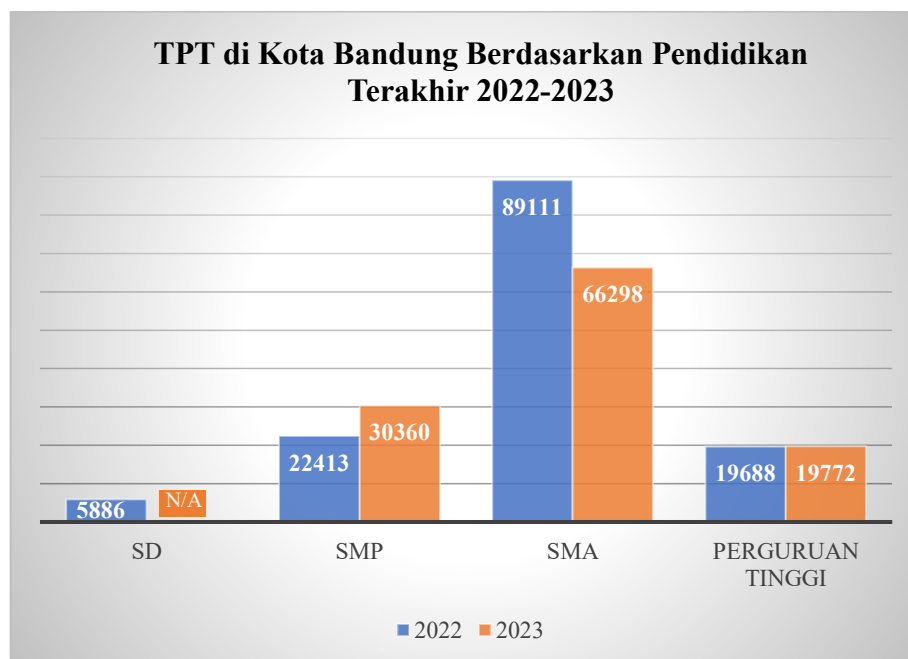
Gambar 1.5 Data Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Barat (dalam persen) 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat jelas bahwa jumlah pengangguran terbuka lulusan universitas pada Agustus 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan cukup kecil antara tahun 2022 dan 2023,

peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024. Kenaikan jumlah TPT dari 5,89% di tahun 2023 menjadi 7,37% di tahun 2024 menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja bagi lulusan universitas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah lulusan baru yang terus bertambah namun tidak diimbangi oleh pertumbuhan lapangan kerja, pergeseran kebutuhan pasar kerja yang lebih menekankan pada keterampilan teknis atau vokasional, serta kurangnya kesesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan dunia industri.

Kondisi serupa juga dapat diamati secara lebih spesifik di tingkat kota, seperti di Kota Bandung. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan mencerminkan tantangan serius dalam dunia ketenagakerjaan. Meskipun terdapat tren penurunan angka pengangguran di kalangan lulusan diploma dan universitas, jumlahnya masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti meningkatnya program pelatihan keterampilan, kebijakan pemerintah yang mendorong kewirausahaan, serta pertumbuhan sektor industri kreatif yang membuka lebih banyak peluang kerja bagi lulusan pendidikan tinggi. Namun, masih cukup tingginya jumlah pengangguran pada lulusan universitas atau diploma tetap menjadi permasalahan karena ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja di kalangan *fresh graduate*, serta terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Selain itu, persaingan ketat di dunia kerja juga semakin memperumit proses pencarian pekerjaan bagi lulusan yang belum memiliki keunggulan kompetitif. Secara komprehensif, gambar 1.6 berikut ini akan memberikan gambaran TPT berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi.



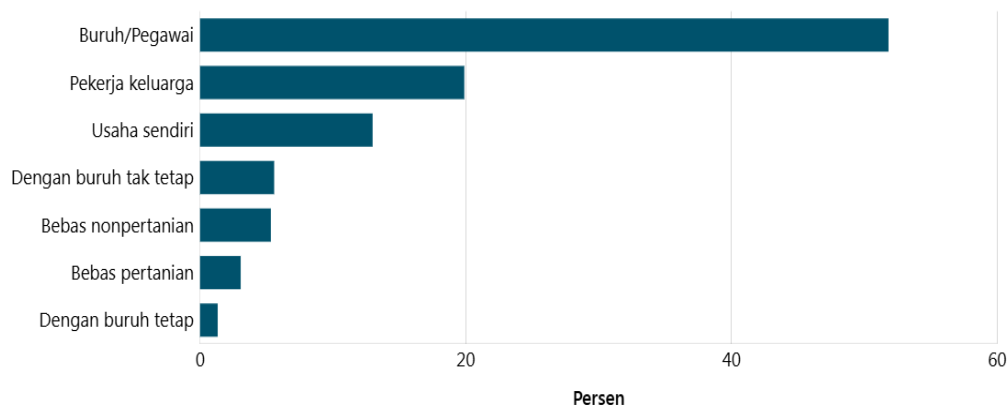
Gambar 1.6 Pengangguran Terbuka di Kota Bandung dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa), 2022-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa TPT 2022-2023 pada tingkat lulusan diploma atau universitas nilainya masih cukup besar. Pada tahun 2023 angka pengangguran terbuka sebesar 19.772 jiwa atau sebesar 17% dari total keseluruhan pengangguran. Angka ini terbilang cukup besar dan menjadi permasalahan yang cukup serius untuk diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan sesuai dengan dunia kerja, namun menciptakan lapangan usaha melalui wirausaha. Terlebih lagi, TPT pada lulusan perguruan tinggi terus meningkat setiap tahunnya yang menguatkan bahwa permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam faktor yang menyebabkannya.

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda khususnya mahasiswa tidak hanya disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dibanding lapangan kerja, namun orientasi pemuda yang memilih menjadi buruh/pegawai di suatu instansi, yang menjadi faktor utama tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020



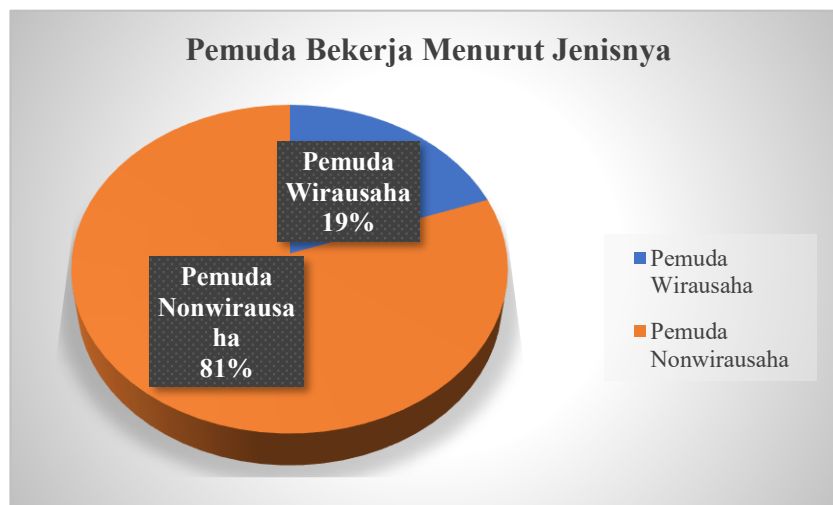
Sumber:
Badan Pusat Statistik (BPS)

Informasi Lain:

Gambar 1.7 Presentase Pemuda Bekerja

Sumber: Databoks.katadata.co.id, 2021

Berdasarkan gambar 1.7 di atas, sebanyak 51,82% pemuda Indonesia lebih memilih menjadi buruh atau pegawai di sebuah instansi. Jumlah ini relatif besar jika dibandingkan dengan populasi pemuda Indonesia yang mencapai 64,5 juta, atau sekitar 1/4 dari total penduduk Indonesia. Di sisi lain, hanya 12,99% pemuda yang memilih berusaha sendiri atau menjadi seorang wirausaha. Jumlah ini menunjukkan kecilnya minat pemuda Indonesia untuk menjadi seorang wirausaha sehingga perlu dilakukan berbagai strategi khusus yang mendorong meningkatnya wirausaha di kalangan pemuda. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data yang dilaporkan oleh BPS (2022) bahwa dari 100 pemuda yang bekerja, hanya 19 orang yang berstatus sebagai wirausahawan. Data ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat pemuda di Indonesia untuk menjadi seorang wirausaha. Minat yang rendah tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, namun faktor eksternal seseorang.



Gambar 1.8 Pemuda Bekerja Menurut Jenisnya 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik 2022 terlihat bahwa gambaran pemuda bekerja berdasarkan status pekerjaan dibagi menjadi pemuda wirausaha dan pemuda nonwirausaha. Presentase pemuda wirausaha sangat kecil dibandingkan dengan pemuda non wirausaha. Sehingga memberikan gambaran bahwa minat berwirausaha bagi pemuda khususnya mahasiswa Indonesia masih tergolong rendah dan perlu terus ditingkatkan. Terlebih lagi konsep wirausaha hijau yang baru-baru ini muncul sebagai respon permasalahan lingkungan, jumlahnya masih sangat kecil. Hal ini bisa disebabkan oleh konsep wirausaha hijau yang masih baru maupun banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman berkaitan konsep ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanihuruk & Simanjuntak (2024), membuktikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat wirausaha di kalangan mahasiswa, diantaranya keterbatasan modal, minimnya dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman, ketakutan dalam mengambil resiko di masa depan, dan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berwirausaha. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Ika et al. (2018) yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti minimnya akses modal dan pembiayaan usaha, kurangnya pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, dukungan yang tidak maksimal, dan

persepsi terhadap resiko di masa depan menjadi faktor utama rendahnya minat wirausaha di kalangan mahasiswa.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penulis secara khusus akan melakukan penelitian di Universitas Pasundan dan Universitas Langlangbuana Bandung. Pemilihan kedua Universitas ini didasari tiga hal utama. Pertama, kedua Universitas di atas adalah perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang memiliki program studi pendidikan ekonomi. Kedua, penulis menemukan fenomena mengenai kurangnya minat untuk menjadi wirausaha di kalangan mahasiswa. Ketiga, Universitas Pasundan menjadi salah satu kampus yang mendukung program Pemerintah Provinsi Bandung yaitu Kang Pisman yang berarti (kurangi, pisahkan, dan manfaatkan). Berikut ini program Kang Pisman Goes to Campus tahun 2020.



Gambar 1.9 Program Kang Pisman Goes to Campus, 2020

Sumber: <https://www.unpas.ac.id/unpas-deklarasikan-mendukung-program-kang-pisman/>

Universitas Pasundan turut berperan aktif dalam kegiatan *Kang Pisman* yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. *Kang Pisman* merupakan singkatan dari *Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan*, yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah, memilah sampah berdasarkan jenisnya, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai guna agar tidak mencemari lingkungan. Dalam implementasinya, Universitas Pasundan mengedukasi

mahasiswa dan civitas akademika mengenai pentingnya pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas pemilahan sampah di area kampus, serta mendorong kegiatan daur ulang melalui berbagai inisiatif kreatif. Selain itu, kampus ini juga berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan pemerintah daerah untuk memperluas dampak program ini di masyarakat. Partisipasi aktif institusi pendidikan seperti Universitas Pasundan diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah demi mendukung terciptanya Kota Bandung yang lebih bersih dan berwawasan lingkungan.

Selain melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Universitas Pasundan juga bekerja sama dengan pemerintah melalui MPR RI dengan mengadakan kegiatan seminar “MPR RI Goes to Campus” dengan tema Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim. Kegiatan ini menghadirkan tokoh-tokoh publik untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan terhadap lingkungan. Berikut ini dokumentasi kegiatan seminar yang telah dilakukan.



Gambar 1.10 Seminar Nasional “MPR RI Goes to Campus”, 2025

<https://www.unpas.ac.id/mpri-ajak-mahasiswa-unpas-pahami-urgensi-transisi-energi-cegah-dampak-perubahan-iklim/>

Seminar nasional ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI dan pejabat Universitas Pasundan serta ratusan mahasiswa yang menyoroti isu perubahan iklim dan penggunaan energi berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa UNPAS telah mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, gas, dan bahan bakar minyak, yang telah diaplikasikan pada desa binaan UNPAS sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap lingkungan yang semakin memprihatinkan.

Tidak hanya Universitas Pasundan, Universitas Langlangbuana juga setiap tahun rutin melakukan kegiatan Expo Kewirausahaan UNLA yang memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam rangka meningkatkan minat mereka dalam dunia wirausaha. Berikut dokumentasi kegiatan Expo Kewirausahaan UNLA.



Gambar 1.11 Expo Kewirausahaan UNLA, 2025

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Universitas Langlangbuana

Pada kegiatan Expo Kewirausahaan UNLA, banyak mahasiswa yang melakukan berbagai inovasi, baik makanan, minuman, kosmetik, hingga pakaian dan aksesoris menarik. Beberapa mahasiswa ada yang berinovasi membuat pakaian dan tas dengan bahan ramah lingkungan dan harga yang terjangkau. Hal ini menjadi

sebuah inovasi yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan agar menjadi pilihan karir bagi mahasiswa.

Adanya berbagai program seminar dan pameran kewirausahaan yang dijalankan oleh kedua kampus, secara teori harusnya mampu mendorong minat mereka untuk terjun ke dalam dunia usaha. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa di kedua kampus memiliki minat berwirausaha yang tergolong rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai obyek penelitian, mengingat tujuan mereka yang belum terserap dalam padat karya (praktisi) yang sesuai bidang keilmuan, dengan demikian kewirausahaan bagi mereka adalah pilihan berkarir sesuai dengan bidang ilmunya. Tabel 1.3 berikut ini akan memberikan gambaran mengenai pilihan pekerjaan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Pasundan angkatan 2020 setelah lulus kuliah.

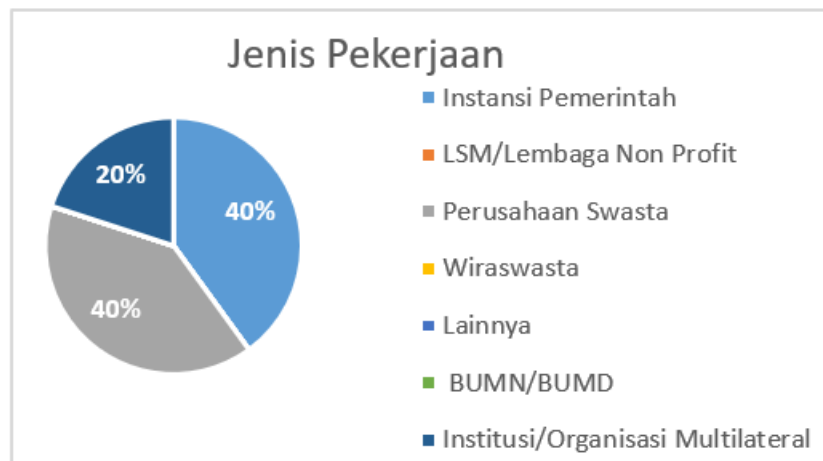
Tabel 1.3 Pilihan Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Unpas Setelah Lulus Kuliah

No.	Pilihan Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Bekerja di perusahaan pemerintah/swasta	57	70,4%
2	Wirausaha	24	29,6%
TOTAL		81	100%

Sumber: Ayuningsih, 2021.

Dari 81 responden, terlihat hanya 24 mahasiswa atau 29,6% yang berminat untuk menjadi seorang wirausaha. Sisanya sebanyak 57 mahasiswa atau 70,4% lebih memilih untuk bekerja di perusahaan pemerintah dan swasta. Hasil ini menjadi sebuah bukti bahwa masih rendahnya minat mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Pasundan dalam berwirausaha. Hal ini yang menjadi dasar peneliti berusaha mengkaji lebih mendalam topik minat kewirausahaan, khususnya wirausaha hijau di kalangan mahasiswa. Rendahnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa menjadi masalah penting untuk dikaji lebih mendalam untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan ini.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan fenomena yang sama di Universitas Langlangbuana dari hasil *tracer study* yang telah didapatkan. *Tracer study* dilakukan pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2020 yang telah lulus, dan berikut ini hasilnya.



Gambar 1.12 Hasil Tracer Study Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sumber: Admin Program Studi, 2025

Berdasarkan hasil *tracer study*, mayoritas lulusan angkatan 2020 dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Langlangbuana memilih untuk bekerja di instansi pemerintah, dengan persentase mencapai 40%. Sementara itu, sebagian lainnya bekerja di sektor swasta maupun di institusi atau organisasi multilateral. Temuan ini mencerminkan bahwa minat berwirausaha di kalangan mahasiswa merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat berimplikasi luas terhadap berbagai sektor. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, permasalahan ini juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sedang diupayakan oleh pemerintah.

Adanya pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi menjadi peluang terbaik bagi pemerintah untuk mencapai target rasio kewirausahaan yang telah ditetapkan (Dyanti et al., 2024). Di sisi lain, inovasi bisnis berupa wirausaha hijau juga menjadi target bisnis yang tidak boleh dilewatkan. Perubahan yang terjadi dalam aspek bisnis dan lingkungan telah mendorong komunitas internasional untuk mengadopsi konsep ekonomi hijau, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah lingkungan dalam kegiatan

bisnis atau kewirausahaan (Santika et al., 2024). Kewirausahaan hijau telah menjadi fokus utama bagi pemerintah, akademisi, dan pembuat kebijakan sebagai upaya mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Namun, dukungan lembaga terhadap pengembangan wirausaha hijau terutama di negara berkembang masih sangat terbatas (Tien et al., 2020). Di Indonesia, skala industri hijau relatif kecil dibandingkan keseluruhan sektor industri. Pada tahun 2021, hanya 137 perusahaan yang meraih penghargaan industri hijau dan 7 industri yang memperoleh sertifikat industri hijau atas komitmen mereka menerapkan efisiensi produksi untuk mendukung ekonomi hijau, teknologi bersih, dan produk ramah lingkungan (Kemenperin, 2021). Angka ini masih jauh dari proporsi industri nasional secara keseluruhan. Berdasarkan laporan dari Kemenperin RI (2021), tercatat 30.578 perusahaan industri di Indonesia dan industri manufaktur terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data tersebut, hanya 0,44% industri di Indonesia yang telah berfokus pada wirausaha hijau.

Memulai menjadi seorang wirausaha bukanlah hal yang mudah, sebab dibutuhkan minat yang kuat dan siap menghadapi resiko yang mungkin terjadi (Monica & Nawawi, 2022). Terkhusus wirausaha hijau, bisnis yang mungkin masih belum begitu umum di tengah masyarakat. Minat wirausaha hijau dapat dibentuk oleh beberapa faktor, baik kesadaran lingkungan, peluang usaha maupun faktor lainnya (Misztal & Kowalska, 2023). Pengembangan minat terhadap kewirausahaan hijau dapat difasilitasi melalui strategi pemasaran sosial yang diterapkan di lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup integrasi pendidikan kewirausahaan dan penguatan infrastruktur institusional yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan (Qazi et al., 2020). Institusi pendidikan bersama ekosistem kewirausahaan memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan konsep kewirausahaan hijau, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip hijau dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan yang dibutuhkan (Ramayah et al., 2022).

Penelitian ini berlandaskan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap

perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap mencerminkan evaluasi individu terhadap suatu perilaku, apakah dianggap positif atau negatif. Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan yang dapat mendorong atau menghambat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perilaku tersebut. Dalam konteks kewirausahaan hijau, norma subjektif menjadi faktor penting yang perlu dikaji karena dukungan atau dorongan sosial dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam usaha yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Selain TPB, penelitian ini juga menggunakan teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura (1986). Teori ini menekankan peran penting efikasi diri yang diartikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri mempengaruhi cara berpikir seseorang, merasa, memotivasi diri, dan bertindak. Individu dengan efikasi diri yang tinggi cenderung lebih berani menghadapi tantangan, memandang hambatan sebagai peluang belajar, dan lebih gigih dalam mencapai target. Dalam kewirausahaan hijau, efikasi diri yang tinggi dapat mendorong mahasiswa untuk lebih percaya diri dalam memulai dan mengelola bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Kedua teori ini memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi. TPB menjelaskan bahwa niat berwirausaha hijau dibentuk melalui interaksi antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, sedangkan Teori Kognitif Sosial memperdalam pemahaman mengenai peran keyakinan pribadi (efikasi diri) dalam menentukan perilaku tersebut. Berdasarkan kerangka teori ini, penelitian akan difokuskan pada empat variabel utama: pendidikan kewirausahaan, efikasi diri, norma subjektif, dan minat berwirausaha hijau. Pendidikan kewirausahaan dan efikasi diri diposisikan sebagai faktor yang memengaruhi minat berwirausaha hijau, sementara norma subjektif berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani

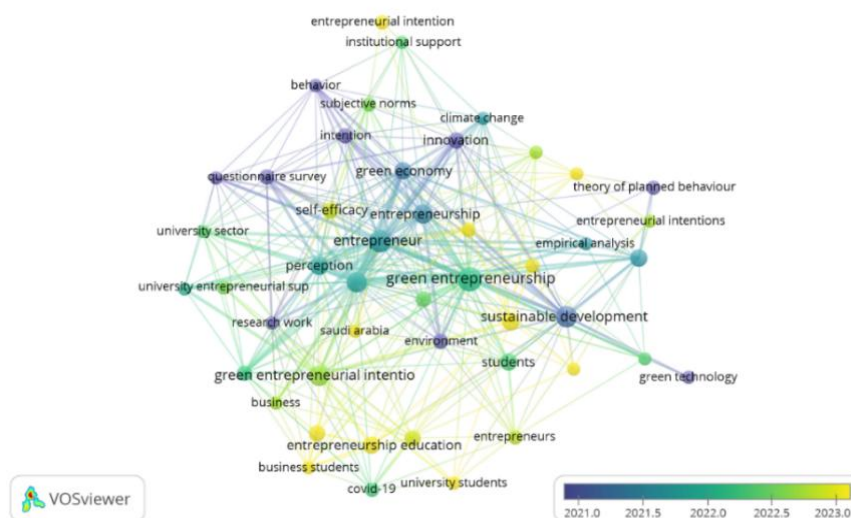
pengaruh kedua faktor tersebut terhadap minat berwirausaha hijau. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berperan positif dan signifikan dalam meningkatkan minat individu untuk terjun ke dunia wirausaha (Mambali et al., 2024; Widyawati & Mujiati, 2021; Akmal et al., 2020; Prasetya & Ariska, 2021; Patricia & Silangen, 2016). Sebaliknya, sejumlah studi menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk berwirausaha (Pratana & Margunani, 2019; Anam et al., 2021). Ketidaksesuaian temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut terkait hubungan antara pendidikan kewirausahaan dan minat berwirausaha.

Fenomena rendahnya minat berwirausaha hijau di kalangan mahasiswa menjadi perhatian penting dalam upaya mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Meskipun kesadaran akan isu lingkungan semakin meningkat, banyak mahasiswa belum melihat wirausaha hijau sebagai pilihan karier yang menarik atau layak secara ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis berkelanjutan, namun dampaknya terhadap minat masih beragam. Di sisi lain, efikasi diri sebagai keyakinan individu akan kemampuannya juga berperan penting, tetapi pengaruhnya dapat diperkuat atau dilemahkan oleh faktor sosial. Salah satu faktor sosial yang menonjol adalah norma subjektif, yaitu keyakinan individu tentang pandangan atau harapan orang-orang yang dianggap penting, yang dapat mendorong atau menghambat keputusan untuk memulai usaha hijau. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, minat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, salah satunya adalah norma subjektif yang mencerminkan tekanan sosial terhadap perilaku tertentu. Norma ini menggambarkan pengaruh sosial yang diterima individu terkait dengan keputusan untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku. Dalam penelitian ini, norma subjektif diartikan sebagai persepsi individu terhadap harapan atau pandangan orang lain yang dianggap penting, yang pada akhirnya dapat mendorong keputusan mereka untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan tertentu (Susanto & Sahetapy, 2021). Sejumlah studi menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh

positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha (Darmawan & Warmika, 2016; Anggraini & Patricia, 2018; Al Hafiz et al., 2022; Sugiharti, 2013). Namun, terdapat pula temuan yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat untuk berwirausaha (Islami, 2017; Hansfel & Puspitowati, 2020). Ketidaksesuaian hasil-hasil ini mencerminkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut terkait peran norma subjektif dalam membentuk minat berwirausaha.

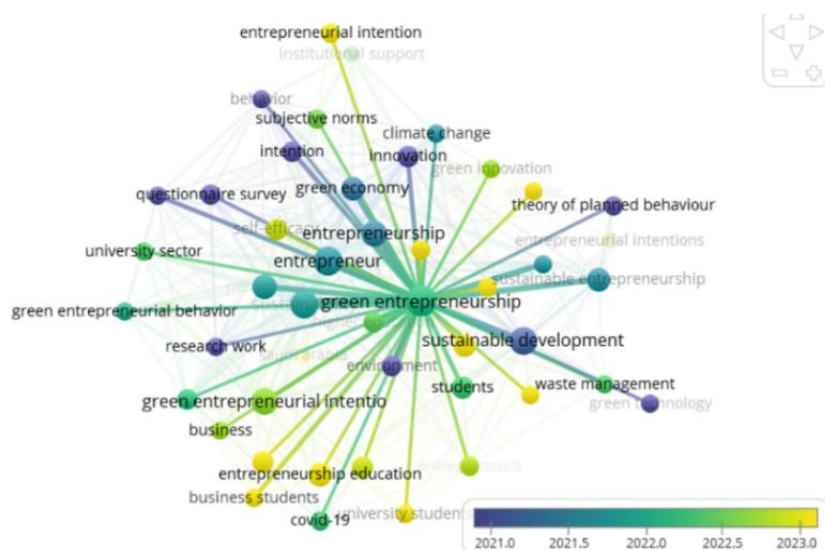
Selain norma subjektif, faktor efikasi diri juga banyak diteliti sebagai penentu minat berwirausaha, khususnya dalam konteks wirausaha hijau. Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan hijau memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat untuk terlibat wirausaha (Maryani & Yuniarsih, 2022). Namun demikian, tidak sedikit pula penelitian yang menunjukkan bahwa efikasi diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha (Wang et al., 2021; Nguyen et al., 2022). Ketidakkonsistenan temuan penelitian tersebut mencerminkan adanya ruang untuk eksplorasi lebih lanjut dalam memahami bagaimana efikasi diri berperan dalam membentuk minat berwirausaha hijau secara lebih mendalam dan kontekstual.

Setelah menganalisis berbagai inkonsistensi berbagai penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian, penulis mencoba untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan menggunakan software VOSviewer untuk mencari variabel-variabel yang saling terkait dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Dengan menggunakan kata kunci *TITLE-ABS-KEY (green AND entrepreneurship AND intention)* dan menggunakan database scopus, penulis menemukan 97 dokumen yang kemudian akan dianalisis tren penelitiannya. Setelah memasukkan data yang diperoleh dari database scopus pada aplikasi VOSviewer, berikut tampilan yang didapatkan.



Gambar 1.13 Gap Penelitian Berdasarkan Penelitian Sebelumnya
Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan 97 dokumen yang dianalisis, penulis mendapatkan 47 kata kunci yang saling terhubung satu dengan lainnya. Setelah mengetahui jumlah kata kunci, penulis selanjutnya mencoba menganalisis lebih dalam dengan melihat pada *overlay visualization* untuk mengetahui kata kunci yang paling terkait dengan minat wirausaha hijau dan paling banyak diteliti baru-baru ini. Berikut hasil analisis yang telah dilakukan.



Gambar 1.14 Kata Kunci Terbaru Berdasarkan Overlay Visualization
Sumber: Data yang diolah, 2024

Bayu Prasetyo, 2025

PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN EFIKASI DIRI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA HIJAU DIMEDIASI OLEH NORMA SUBJEKTIF

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk memperjelas posisi penelitian ini dan menemukan ruang kontribusi ilmiah yang belum banyak dieksplorasi, diperlukan pemetaan kesenjangan (*research gap*) berdasarkan literatur yang ada. Hasil analisis bibliometrik memungkinkan peneliti mengidentifikasi topik yang sudah sering dibahas, hubungan antar variabel yang telah diuji, serta area yang masih jarang atau belum tersentuh. Dengan demikian, tabel 1.4 berikut disusun untuk menggambarkan gap penelitian yang ditemukan melalui analisis bibliometrik tersebut.

Tabel 1.4 Gap Penelitian Berdasarkan Analisis Bibliometrik

Kata Kunci	Tingkat Kebaruan (berdasarkan warna)	Fokus Penelitian yang Sering Muncul	Celah Penelitian (Gap) yang Ditemukan
Green Entrepreneurship	Tinggi	Banyak dikaitkan dengan sustainable development, entrepreneur, dan green entrepreneurial intention	Masih sedikit penelitian yang menguji faktor psikologis seperti efikasi diri dan norma subjektif sebagai pendorong minat berwirausaha hijau di kalangan mahasiswa.
Sustainable Development	Tinggi	Dihubungkan dengan entrepreneurship education, waste management, dan climate change	Belum banyak dikaji keterkaitan langsungnya dengan perilaku kewirausahaan berbasis mahasiswa.
Entrepreneurship Education	Tinggi	Sering dibahas dengan green entrepreneurship dan mahasiswa	Gap pada pengujian peran pendidikan kewirausahaan dalam membentuk minat mahasiswa melalui mekanisme norma subjektif

Lanjutan			
Kata Kunci	Tingkat Kebaruan (berdasarkan warna)	Fokus Penelitian yang Sering Muncul	Celah Penelitian (Gap) yang Ditemukan
Green Entrepreneurship Intention	Sedang	Umumnya terkait sikap, perilaku hijau, dan keberlanjutan	Belum banyak kajian yang memasukkan variabel dari teori TPB salah satunya norma subjektif sebagai variabel mediasi untuk mengukur minat berwirausaha hijau.
Subjective Norm	Sedang	Lebih banyak dibahas dalam konteks perilaku umum atau kewirausahaan konvensional	Gap para penerapan norma subjektif untuk menjelaskan minat berwirausaha hijau, terutama pada populasi mahasiswa.
Theory of Planned Behaviour	Sedang	Sering menjadi kerangka teoritis umum	Perlu adanya penelitian yang memadukan TPB dengan faktor kontekstual seperti pendidikan kewirausahaan dan isu lingkungan.

Sumber: Analisis Bibliometrik, 2025.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menyusun ulang desain penelitian dan memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Hijau Dimediasi oleh Norma Subjektif (Survei pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan, fokus utama dalam penelitian ini dirumuskan pada permasalahan berikut.

1. Bagaimana gambaran pendidikan kewirausahaan, efikasi diri, norma subjektif, dan minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
2. Seberapa besar pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
3. Seberapa besar pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap norma subjektif pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
4. Seberapa besar peran norma subjektif dalam memediasi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
5. Seberapa besar efikasi diri berpengaruh terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
6. Seberapa besar efikasi diri berpengaruh terhadap norma subjektif pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
7. Seberapa besar peran norma subjektif dalam memediasi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan:

1. Gambaran pendidikan kewirausahaan, efikasi diri berwirausaha, norma subjektif, dan minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
2. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.

3. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap norma subjektif pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
4. Peran norma subjektif dalam memediasi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
5. Pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
6. Pengaruh efikasi diri terhadap norma subjektif pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.
7. Peran norma subjektif dalam memediasi pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha hijau pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Perguruan Tinggi Swasta Se-Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap kewirausahaan hijau, seperti pendidikan kewirausahaan, efikasi diri, dan norma subjektif. Temuan penelitian ini juga berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan teori di bidang kewirausahaan berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang relevan bagi pemangku kepentingan, antara lain:

1. Memberikan wawasan yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mendorong minat mahasiswa terhadap kewirausahaan hijau.
2. Menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tema serupa dalam konteks atau pendekatan yang berbeda.

3. Memberikan masukan bagi dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya program studi pendidikan ekonomi.
4. Menyediakan informasi tambahan bagi perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi tumbuhnya minat berwirausaha hijau di kalangan mahasiswa.